



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.280, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Infrastruktur.
Pendidikan. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/PMK.07/2010
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun 2010 untuk daerah kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.7/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.7/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

- (1) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) yang dialokasikan kepada daerah kabupaten/kota adalah bagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010.
- (2) Alokasi DPPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- (3) DPPIP dialokasikan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Daerah kabupaten/kota yang menerima DPPIP beserta besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Rincian daerah penerima dan besaran alokasi DPPIP untuk masing-masing bidang adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Alokasi DPPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk setiap bidang.

Pasal 3

DPPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010.

Pasal 4

Alokasi DPPIP Tahun Anggaran 2010 untuk kabupaten/kota dipergunakan untuk kegiatan:

- a. rehabilitasi dan/pembangunan ruang kelas SD/SDLB/MI;
- b. rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SMP/SMPLB/MTs;
- c. rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SMA/SMK/MA/MA Kejuruan/SMALB; dan
- d. rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SLB.

Pasal 5

Kegiatan yang tidak dapat didanai dari DPPIP meliputi:

- a. dana pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK);
- b. sewa (contoh: gedung kantor, kendaraan operasional);
- c. administrasi kegiatan (contoh: gaji, honor, lembur, alat tulis kantor);
- d. penelitian;
- e. pelatihan; dan
- f. perjalanan dinas pegawai daerah.

Pasal 6

- (1) Penyaluran DPPIP Tahun 2010 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran DPPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 - b. Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus.
- (4) Penyaluran Tahap I dilaksanakan setelah daerah penerima menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima paling lambat tanggal 31 Juli 2010.
- (7) Penyaluran Tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakan setelah laporan penyerapan penggunaan DPPIP tahap sebelumnya diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (8) Laporan penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 7

- (1) Laporan penyerapan penggunaan DPPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) disampaikan setelah penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Laporan penyerapan penggunaan DPPIP Tahap I atau Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), diterima paling lambat tanggal 15 Desember 2010.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai DPPIP harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2010.
- (2) Hasil dari kegiatan yang didanai DPPIP sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2010.

Pasal 9

Daerah penerima DPPIP melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran dana yang diterimanya.

Pasal 10

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DPPIP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

NO	DAERAH	JALAN JEMBATAN	IRIGASI	PELAYANAN KESEHATAN RUDJIKAN	PRASARANA PEMDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEWANGAN DAERAH	JUMLAH
XXI	Provinsi Sulawesi Utara	13.324.000	-	-	4.933.000	1.000.000	24.329.000
XXII	Provinsi Gorontalo	19.340.000	2.475.000	-	-	-	21.705.000
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	3.812.500	-	1.000.000	4.812.500
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan	14.505.000	8.720.000	-	-	1.000.000	24.205.000
XXV	Provinsi Sulawesi Barat	19.307.000	3.880.000	-	-	1.000.000	24.187.000
XXVI	Provinsi Sulawesi Tenggara	23.175.000	-	-	-	1.000.000	24.175.000
XXVII	Provinsi Bali	-	-	-	23.582.000	1.000.000	24.582.000
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
XXIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
XXX	Provinsi Maluku	24.175.000	-	-	-	-	24.175.000
XXXI	Provinsi Maluku Utara	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
XXXII	Provinsi Papua	23.175.000	-	-	-	1.000.000	24.175.000
XXXIII	Provinsi Papua Barat	9.070.000	-	-	24.402.000	-	24.475.000
TOTAL PROVINSI		258.943.975	38.251.000	12.437.500	48.483.000	10.000.000	358.941.475

PENETAPAN ALOKASI
DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH
UNTUK KABUPATEN/KOTA TA. 2010

(dalam juta rupiah)

NO	DALIAH	JALANI JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	PELABUHAN DAERAH	PRASARANA PENDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH
1	Kab. Aceh Barat	4.835,000	15.000,000	-	-	-	-	-	-	19.835,000
2	Kab. Aceh Besar	21.175,000	-	-	-	-	-	-	1.000,000	24.175,000
3	Kab. Aceh Selatan	9.570,000	14.550,000	-	-	-	-	-	-	24.120,000
4	Kab. Aceh Singkil	2.934,000	-	-	-	-	-	-	-	2.934,000
5	Kab. Aceh Tenggara	20.250,000	-	-	-	4.812,500	-	-	-	24.962,500
6	Kab. Aceh Timur	4.835,000	24.250,000	-	-	19.250,000	-	-	-	48.335,000
7	Kab. Bener Meriah	24.485,975	-	-	-	-	-	-	-	24.485,975
8	Kab. Bireu	24.175,000	-	-	-	-	-	-	-	24.175,000
9	Kab. Bireu	24.175,000	-	-	-	-	-	-	-	24.175,000
10	Kab. Bireu	24.175,000	-	-	-	-	-	-	1.000,000	25.175,000
11	Kab. Bireu	9.570,000	14.550,000	-	-	-	-	-	-	24.120,000
12	Kab. Bireu	24.175,000	-	-	-	-	-	-	-	24.175,000
13	Kab. Bireu	24.175,000	-	-	-	-	-	-	-	24.175,000
14	Kab. Bireu	12.067,500	-	-	-	-	-	-	-	12.067,500
15	Kab. Gayo Lues	24.175,000	-	-	-	-	-	15.000,000	-	39.175,000
16	Kab. Gayo Lues	-	-	-	-	3.625,000	-	-	-	3.625,000
17	Kab. Gayo Lues	21.000,000	-	-	-	-	-	-	-	21.000,000
18	Kab. Gayo Lues	-	-	9.500,000	-	-	-	9.000,000	-	18.500,000
19	Kab. Gayo Lues	-	-	-	-	24.062,500	-	-	-	24.062,500
20	Kab. Gayo Lues	9.570,000	-	-	-	-	-	-	-	9.570,000

NO	DAERAH	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN RUKUKAN	PELABUHAN DAERAH	PRASARANA PENDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH
21	Kab. Dair	17.400,000	-	-	-	-	-	-	-	17.400,000
22	Kab. Deli Serdang	9.670,000	-	4.925,000	-	-	-	-	-	14.595,000
23	Kab. Empat Kari	3.868,000	-	-	-	5.775,000	-	-	-	9.643,000
24	Kab. Langkat	-	-	-	-	9.625,000	-	-	-	9.625,000
25	Kab. Mandailing Natal	7.735,000	2.910,000	-	-	-	-	-	-	10.645,000
26	Kab. Nias	9.670,000	-	-	-	-	-	14.805,000	-	24.475,000
27	Kab. Pangasinan	14.505,000	-	-	-	-	-	-	-	14.505,000
28	Kab. Pematangsari	4.835,000	-	-	-	-	-	-	-	4.835,000
29	Kab. Pangasinan	2.863,000	-	-	-	-	-	-	-	2.863,000
30	Kab. Pangasinan	1.924,000	17.400,000	-	-	-	9.750,000	-	-	19.324,000
31	Kab. Pangasinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kab. Pangasinan	9.570,000	-	-	-	-	-	-	-	9.570,000
33	Kab. Pangasinan	4.835,000	-	-	-	-	-	-	-	4.835,000
34	Kab. Pangasinan	19.340,000	-	-	-	-	-	-	-	19.340,000
35	Kab. Pangasinan	-	-	-	-	-	-	4.935,000	-	4.935,000
36	Kab. Pangasinan	-	-	-	-	-	-	-	1.000,000	1.000,000
37	Kab. Pangasinan	-	-	-	-	-	-	-	1.000,000	1.000,000
38	Kab. Pangasinan	13.600,000	-	-	-	-	-	-	1.000,000	14.600,000
39	Kab. Pangasinan	-	-	-	-	-	-	-	1.000,000	1.000,000
40	Kab. Pangasinan	8.800,000	-	-	-	-	-	-	1.000,000	9.800,000
41	Kab. Pangasinan	-	-	-	-	-	-	-	1.000,000	1.000,000
42	Kab. Pangasinan	9.670,000	-	-	-	-	-	-	1.000,000	10.670,000
43	Kab. Pangasinan	-	-	-	-	-	-	-	1.000,000	1.000,000
44	Kab. Pangasinan	18.685,375	-	-	-	-	-	-	1.000,000	19.685,375
45	Kab. Pangasinan	-	-	-	-	-	-	-	1.000,000	1.000,000
46	Kab. Pangasinan	-	-	-	-	-	-	-	1.000,000	1.000,000
47	Kab. Pangasinan	19.340,000	-	-	-	-	-	-	1.000,000	20.340,000

NO	DAERAH	JALAN/ JENBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	PELABUHAN DAERAH	PRASARANA PEMDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH
48	Kota Sukra	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
49	Kota Banjarmasin	-	11.125.000	12.312.500	-	-	-	-	1.000.000	24.437.500
50	Kab. Paser dan Berau	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
51	Kab. Paser dan Berau	23.175.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	24.175.000
52	Kab. Berau dan Kutai	23.175.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	24.175.000
53	Kab. Kutai	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
54	Kota Samarinda	-	-	-	-	9.625.000	-	-	-	9.625.000
55	Kota Balikpapan	23.175.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	24.175.000
56	Kab. Berau	19.340.000	-	-	-	-	-	-	-	19.340.000
57	Kab. Kutai	23.175.000	-	-	-	-	-	-	-	23.175.000
58	Kab. Kutai	19.340.000	-	-	-	-	-	-	-	19.340.000
59	Kab. Kutai	5.625.000	-	4.925.000	-	-	-	-	-	10.550.000
60	Kab. Kutai	5.625.000	-	-	-	18.250.000	-	-	1.000.000	24.250.000
61	Kab. Kutai	5.625.000	-	-	-	16.437.500	-	-	-	22.062.500
62	Kab. Kutai	5.625.000	-	-	-	-	-	-	-	5.625.000
63	Kab. Kutai	5.625.000	-	-	-	9.625.000	-	-	-	15.250.000
64	Kab. Kutai	5.625.000	-	-	-	4.812.500	-	-	-	10.437.500
65	Kab. Kutai	5.625.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	8.625.000
66	Kab. Kutai	5.625.000	-	-	-	-	-	-	-	5.625.000
67	Kab. Kutai	5.625.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	6.625.000
68	Kab. Kutai	5.625.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	8.625.000
69	Kab. Kutai	5.625.000	-	19.400.000	-	-	-	-	-	24.025.000
70	Kab. Kutai	5.625.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	6.625.000
71	Kab. Kutai	24.175.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
72	Kab. Kutai	19.340.000	-	-	-	-	-	4.935.000	-	24.275.000
73	Kab. Kutai	-	9.700.000	-	-	-	-	-	-	9.700.000
74	Kab. Kutai	4.835.000	-	-	-	-	-	-	-	4.835.000

NO	DAERAH	JALAN/ JEWATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN RUMAH	PELABUHAN DAERAH	PRASARANA PEMDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH
75	Kab. GPK. Timur		19.400,000	-	-	-	-	-	-	19.400,000
76	Kab. Banggai		-	-	-	-	-	-	1.000,000	1.000,000
77	Kab. Banggai Tengah		-	-	-	-	-	-	1.000,000	1.000,000
78	Kab. Banggai Selatan	-	-	-	-	-	8.850,000	-	-	8.850,000
79	Kab. Banggai Barat	-	-	-	-	74.000,500	-	-	-	74.000,500
80	Kab. Banggai	17.087,500	-	12.312,500	-	-	-	-	-	29.400,000
81	Kab. Banggai	18.500,000	-	-	-	-	-	-	-	18.500,000
82	Kab. Banggai	19.340,000	4.850,000	-	-	-	-	-	-	24.190,000
83	Kab. Banggai	18.340,000	-	-	-	-	-	-	1.000,000	19.340,000
84	Kab. Banggai	-	-	-	-	-	-	-	1.000,000	1.000,000
85	Kab. Banggai	-	-	-	-	-	-	-	1.000,000	1.000,000
86	Kab. Banggai	18.340,000	-	-	-	-	-	-	1.000,000	19.340,000
87	Kab. Banggai	18.340,000	-	-	-	-	-	-	1.000,000	19.340,000
88	Kab. Banggai	19.340,000	-	-	-	-	-	-	-	19.340,000
89	Kab. Banggai	9.672,000	9.000,000	-	-	-	-	-	-	18.672,000
90	Kab. Banggai	9.672,000	12.500,000	-	-	-	-	-	-	22.172,000
91	Kab. Banggai	23.775,000	-	-	-	-	-	-	1.000,000	24.775,000
92	Kab. Banggai	16.685,073	4.000,000	-	-	-	-	-	1.000,000	21.685,073
93	Kab. Banggai	-	24.175,000	-	-	-	-	-	-	24.175,000
94	Kab. Banggai	24.175,000	-	-	-	-	-	-	-	24.175,000
95	Kab. Banggai	24.175,000	-	-	-	-	-	-	-	24.175,000
96	Kab. Banggai	-	-	-	-	-	-	-	1.000,000	1.000,000
97	Kab. Banggai	-	-	-	-	4.950,000	-	-	-	4.950,000
98	Kab. Banggai	18.470,000	4.850,000	-	-	-	-	-	1.000,000	24.320,000
99	Kab. Banggai	-	2.880,000	-	-	-	-	-	1.000,000	3.880,000
100	Kab. Banggai	18.340,000	4.850,000	-	-	-	-	-	1.000,000	24.190,000
101	Kab. Banggai	14.472,000	4.850,000	-	-	-	-	-	1.000,000	20.322,000

NO	DAERAH	JALAN PELAYANAN	RIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN Keluarga	PELABUHAN DAERAH	PRASARANA PENDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH
102	Kab. Indragiri	-	-	23.825.000	-	-	-	-	1.000.000	74.875.000
103	Kab. Kutai	19.340.000	-	-	-	-	-	-	-	19.340.000
104	Kab. Kutai	4.835.000	-	4.870.000	-	-	-	-	-	9.585.000
106	Kab. Kutai	18.373.000	5.820.000	-	-	-	-	-	-	24.193.000
108	Kab. Kutai	19.340.000	-	-	-	-	-	-	-	19.340.000
109	Kab. Kutai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Kab. Kutai	4.835.000	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Kab. Kutai	7.535.000	19.470.000	-	-	-	-	-	-	27.005.000
112	Kab. Kutai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Kab. Kutai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Kab. Kutai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Kab. Kutai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Kab. Kutai	13.835.000	3.820.000	-	-	-	-	-	-	17.655.000
117	Kab. Kutai	22.185.975	-	-	-	-	-	-	-	22.185.975
118	Kab. Kutai	8.670.000	4.830.000	-	-	-	-	-	-	13.500.000
119	Kab. Kutai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Kab. Kutai	12.252.000	2.475.000	-	-	-	-	-	-	14.727.000
121	Kab. Kutai	13.835.000	-	-	-	-	-	-	-	13.835.000
122	Kab. Kutai	8.670.000	-	-	-	-	-	-	-	8.670.000
123	Kab. Kutai	2.850.000	-	-	-	-	-	-	-	2.850.000
124	Kab. Kutai	24.175.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
125	Kab. Kutai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Kab. Kutai	6.709.000	-	-	-	-	-	-	-	6.709.000
127	Kab. Kutai	24.175.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
128	Kab. Kutai	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	DAERAH	JALAN/ JEMBATAN	TRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	PELABUHAN MERSAH	PRASARANA PFMDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEJAKSAAN DAERAH	JUMLAH
128	Kab. Gresik		4.850,000	-	-	-	-	-	-	4.850,000
129	Kab. Gresik	10.770,000	-	-	-	-	-	-	-	10.770,000
130	Kab. Gresik	14.705,000	-	-	-	24.062,500	-	-	-	24.062,500
131	Kab. Gresik	-	-	-	-	-	-	-	-	24.205,000
132	Kab. Gresik	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,000
133	Kab. Gresik	-	-	-	-	4.812,500	-	-	-	4.812,500
134	Kab. Gresik	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,000
135	Kab. Gresik	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,000
136	Kab. Gresik	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,000
137	Kab. Gresik	-	-	-	-	-	-	-	-	24.162,500
138	Kab. Gresik	9.870,000	-	-	-	-	-	-	-	24.220,000
139	Kab. Gresik	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,000
140	Kab. Gresik	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,000
141	Kab. Gresik	16.922,500	-	-	-	-	-	-	-	16.922,500
142	Kab. Gresik	-	-	-	-	-	-	-	-	24.250,000
143	Kab. Gresik	9.070,000	-	-	-	4.812,500	-	-	-	14.882,500
144	Kab. Gresik	10.340,000	-	-	-	11.550,000	-	-	-	21.890,000
145	Kab. Gresik	4.835,000	-	-	-	-	-	-	-	4.835,000
146	Kab. Gresik	24.130,000	-	-	-	-	-	-	-	24.130,000
147	Kab. Gresik	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,000
148	Kab. Gresik	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,000
149	Kab. Gresik	19.140,000	-	-	-	-	-	-	-	19.140,000
150	Kab. Gresik	9.570,000	-	-	-	-	-	-	-	9.570,000
151	Kab. Gresik	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,000
152	Kab. Gresik	9.670,000	-	-	-	-	-	-	-	9.670,000
153	Kab. Gresik	4.835,000	-	-	-	-	-	-	-	4.835,000
154	Kab. Gresik	6.769,000	-	-	-	-	-	-	-	6.769,000
155	Kab. Gresik	-	-	-	-	-	-	-	-	2.925,000

NO	DAERAH	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	PELABUHAN DAERAH	PRASARANA PENDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH
156	Kab. Sarawak		-	-	-	3.550.000	-	-	1.000.000	4.550.000
157	Kab. Sarawak	14.505.000	-	-	-	-	-	-	-	14.505.000
158	Kab. Sarawak	14.680.000	6.790.000	7.955.000	-	-	-	-	-	29.425.000
159	Kab. Sarawak	24.175.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
160	Kab. Sarawak	-	-	-	-	11.512.500	4.875.000	-	1.000.000	17.387.500
161	Kab. Sarawak	14.505.000	8.700.000	-	-	-	-	-	1.000.000	24.205.000
162	Kab. Sarawak	-	12.500.000	-	-	5.625.000	-	-	-	18.125.000
163	Kab. Sarawak	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
164	Kab. Sarawak	7.735.000	7.760.000	3.540.000	-	4.050.500	-	-	-	23.485.500
165	Kab. Sarawak	10.000.000	11.275.000	-	-	-	-	-	-	21.275.000
166	Kab. Sarawak	6.753.000	15.450.000	-	-	-	-	-	1.000.000	24.203.000
167	Kab. Sarawak	24.775.000	-	-	-	-	-	-	-	24.775.000
168	Kab. Sarawak	-	-	-	-	1.400.250	-	-	-	1.400.250
169	Kab. Sarawak	14.505.000	-	-	-	-	-	-	-	14.505.000
170	Kab. Sarawak	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
171	Kab. Sarawak	8.670.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	9.670.000
172	Kab. Sarawak	-	-	-	-	9.625.000	-	-	-	9.625.000
173	Kab. Sarawak	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
174	Kab. Sarawak	24.175.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
175	Kab. Sarawak	24.437.500	-	-	-	1.868.000	-	-	-	26.305.500
176	Kab. Sarawak	24.175.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
177	Kab. Sarawak	12.700.000	9.800.000	-	-	-	-	-	-	22.500.000
178	Kab. Sarawak	19.340.000	4.850.000	-	-	-	-	-	-	24.190.000
179	Kab. Sarawak	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
180	Kab. Sarawak	-	18.400.000	-	-	-	-	-	1.000.000	19.400.000
181	Kab. Sarawak	-	-	24.625.000	-	-	-	-	-	24.625.000
182	Kab. Sarawak	17.335.000	-	-	-	-	-	-	-	17.335.000

NO	DAERAH	JALAN/ JENBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT	PELABUHAN DAERAH	PRASARANA PEMDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEJANGKARAN DAERAH	JUMLAH
153	Kab. Kutai Barat	18.373,000	-	-	-	-	-	-	-	18.373,000
154	Kab. Mahakam	-	23.185,975	-	-	-	-	-	-	23.185,975
155	Kab. Paser	23.175,000	-	-	-	-	-	-	1.000,000	24.175,000
156	Kab. Samarinda	-	4.850,000	-	-	-	-	-	-	4.850,000
157	Kab. Tenggarong	23.185,975	-	-	-	-	-	-	-	23.185,975
158	Kab. Tenggarong Seberang	23.175,000	-	-	-	-	-	-	1.000,000	24.175,000
159	Kab. Tana Tidjung	3.868,000	-	-	-	-	-	-	-	3.868,000
160	Kab. Kutai Kertanegara	19.300,000	-	-	-	-	-	-	-	19.300,000
161	Kab. Mahakam	19.340,000	-	-	-	-	-	-	-	19.340,000
162	Kab. Sanggau	19.340,000	-	-	-	4.812,500	-	-	-	24.152,500
163	Kab. Seruyan	19.340,000	-	-	-	4.812,500	-	-	-	24.152,500
164	Kab. Mahakam	9.670,000	-	-	-	-	-	-	1.000,000	10.670,000
165	Kab. Kutai Kertanegara	9.670,000	-	-	-	-	-	-	-	9.670,000
166	Kab. Kutai Kertanegara	9.670,000	-	-	-	-	-	-	-	9.670,000
167	Kab. Tana Tondong	19.340,000	-	-	-	-	-	-	-	19.340,000
168	Kab. Mahakam	9.670,000	-	-	-	4.812,500	-	-	-	14.482,500
169	Kab. Kutai Kertanegara	27.175,000	-	-	-	-	-	-	-	27.175,000
170	Kab. Berau	22.175,000	-	-	-	-	-	-	-	22.175,000
171	Kab. Berau	19.340,000	-	-	-	4.812,500	-	-	-	24.152,500
172	Kab. Berau	19.340,000	-	-	-	-	-	-	-	19.340,000
173	Kab. Berau	14.505,000	-	-	-	-	-	-	-	14.505,000
174	Kab. Berau	18.640,000	-	-	-	-	-	-	-	18.640,000
175	Kab. Berau	14.505,000	-	-	-	-	-	-	-	14.505,000
176	Kab. Berau	9.670,000	-	-	-	-	-	-	-	9.670,000
177	Kab. Berau	22.175,000	-	-	-	-	-	-	-	22.175,000
178	Kab. Berau	20.240,000	2.910,000	-	-	-	-	-	-	23.150,000
179	Kab. Berau	-	-	-	-	24.625,000	-	-	-	24.625,000

NO	DAERAH	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	PELABUHAN DAERAH	PRASARANA PMDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH
210	Kab. Dairi	10.340.000	-	-	-	14.400.000	-	-	-	19.340.000
211	Kab. Pangkajene	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	15.400.000
212	Kab. Pangkajene	23.228.000	-	985.000	-	-	-	-	-	24.213.000
213	Kab. Pangkajene	9.800.000	-	-	-	13.550.000	-	-	1.000.000	24.350.000
214	Kab. Pangkajene	14.505.000	-	-	-	8.625.000	-	-	1.000.000	24.130.000
215	Kab. Pangkajene	-	-	-	-	2.405.250	-	-	-	2.405.250
216	Kab. Pangkajene	9.670.000	-	-	-	24.805.000	-	-	-	34.475.000
217	Kab. Pangkajene	10.340.000	4.850.000	-	-	-	-	-	-	15.190.000
218	Kab. Pangkajene	24.175.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
219	Kab. Pangkajene	24.175.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
220	Kab. Pangkajene	27.175.000	-	-	-	-	-	-	-	27.175.000
221	Kab. Pangkajene	25.155.075	-	-	-	-	-	-	-	25.155.075
222	Kab. Pangkajene	19.350.000	-	2.405.500	-	-	-	-	-	21.755.500
223	Kab. Pangkajene	9.670.000	-	-	-	15.000.000	-	-	-	24.670.000
224	Kab. Pangkajene	-	-	-	15.740.000	4.812.500	-	-	-	20.552.500
225	Kab. Pangkajene	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
226	Kab. Pangkajene	15.000.000	4.500.000	-	-	-	-	-	-	19.500.000
227	Kab. Pangkajene	22.685.975	-	-	-	-	-	-	-	22.685.975
228	Kab. Pangkajene	14.050.000	-	-	-	-	9.500.000	-	-	23.550.000
229	Kab. Pangkajene	13.685.975	9.500.000	-	-	-	-	-	-	23.185.975
230	Kab. Pangkajene	3.853.000	6.790.000	-	-	-	-	-	-	10.643.000
231	Kab. Pangkajene	18.685.975	-	-	-	-	-	-	1.000.000	19.685.975
232	Kab. Pangkajene	2.853.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	3.853.000
233	Kab. Pangkajene	18.685.975	4.500.000	-	-	-	-	-	-	23.185.975
234	Kab. Pangkajene	22.670.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	23.670.000
235	Kab. Pangkajene	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
236	Kab. Pangkajene	23.175.000	-	-	14.805.000	9.525.000	-	-	-	47.505.000
237	Kab. Pangkajene	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	LOKASI	JALAN KEMENTERIAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	PELABUHAN DAERAH	PRASARANA PEMDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH
237	Kab. Majene	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
238	Kab. Mamuju	13.685,975	-	-	-	-	-	-	1.000.000	13.685,975
239	Kab. Puncak Murut	10.500,000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	11.500,000
240	Kab. Marau	19.340,000	-	-	-	4.817,500	-	-	-	24.157,500
241	Kab. Marau Utara	9.670,000	-	-	-	5.775,000	-	-	-	15.445,000
242	Kab. Rokan	-	-	-	-	4.812,500	-	-	-	4.812,500
243	Kab. Kutawe	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
244	Kab. Kutawe	9.670,000	13.720,000	-	-	-	-	-	1.000.000	24.390,000
245	Kab. Kutawe	-	-	-	-	4.812,500	-	-	-	4.812,500
246	Kab. Kutawe Utara	8.701,000	-	-	-	-	-	-	-	8.701,000
247	Kab. Kutawe	19.340,000	-	-	-	2.877,777	-	-	-	22.217,777
248	Kab. Kutawe Utara	-	-	-	-	2.877,777	-	-	-	2.877,777
249	Kab. Kutawe Utara	19.340,000	-	4.925,000	-	-	-	-	-	24.265,000
250	Kab. Kutawe Utara	-	-	-	-	-	24.375,000	-	-	24.375,000
251	Kab. Kutawe	19.340,000	-	-	-	-	-	-	-	19.340,000
252	Kab. Kutawe	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
253	Kab. Kutawe	12.340,000	4.870,000	-	-	-	-	-	1.000.000	18.210,000
254	Kab. Kutawe	5.670,000	-	-	-	-	-	-	-	5.670,000
255	Kab. Kutawe	-	-	-	-	9.675,000	-	-	-	9.675,000
256	Kab. Kutawe	19.340,000	4.870,000	-	-	-	-	-	1.000.000	24.210,000
257	Kab. Kutawe	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
258	Kab. Kutawe	13.685,975	-	-	-	-	-	-	-	13.685,975
259	Kab. Kutawe	22.185,975	-	-	-	-	-	-	-	22.185,975
260	Kab. Kutawe Utara	13.685,975	-	-	-	-	-	-	1.000.000	14.685,975
261	Kab. Kutawe Utara	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
262	Kab. Kutawe Utara	10.000,000	-	-	-	14.850,000	-	-	-	24.850,000
263	Kab. Kutawe	22.185,975	-	-	-	-	-	-	-	22.185,975

NO	LOKASI	JAMINAN	LOAN TO VALUE	LOAN TO COST	LOAN TO SALE	PELAYANAN	PELABUHAN	PRASARANA	SISTEM INFORMASI	REMARK
						RUJUKAN	LOAN TO SALE	LOAN TO COST	KEJANGINAN DAERAH	
264	Kab. Malangan		-	-	-	23.062.500	-	-	1.000.000	24.062.500
265	Kota Dima	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
266	Kab. Sambawa Barat	-	-	-	-	-	-	9.870.000	-	9.870.000
267	Kab. Lur-lur Utara	18.685.975	-	-	-	-	-	-	-	18.685.975
268	Kota Raha	19.340.000	-	-	-	-	-	-	-	19.340.000
269	Kab. Lince	19.340.000	-	-	-	4.812.500	-	-	-	24.152.500
270	Kab. Kupang	4.835.000	-	-	-	-	-	-	-	4.835.000
271	Kab. Manggarai	13.800.000	5.850.000	4.850.000	-	-	-	-	-	24.500.000
272	Kab. Njeda	21.274.000	-	-	-	-	-	-	-	21.274.000
273	Kab. Sikka	9.670.000	-	-	-	-	-	14.000.000	-	23.670.000
274	Kab. Sumba Barat	10.621.500	3.580.000	-	-	-	-	-	-	12.901.500
275	Kab. Sumba Timur	16.374.000	5.830.000	-	-	-	-	-	-	24.193.000
276	Kab. Timor Tengah Selatan	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000
277	Kab. Timor Tengah Selatan	15.145.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	16.145.000
278	Kab. Ende	5.703.000	9.700.000	-	-	-	-	-	-	12.403.000
279	Kab. Sumba Barat Daya	13.340.000	-	-	-	-	-	-	-	19.340.000
280	Kab. Maluku Tenggara Barat	19.500.000	-	-	-	-	-	-	-	19.500.000
281	Kab. Nagekeo	24.270.000	-	-	-	-	-	-	-	24.270.000
282	Kab. Pulau Utara	74.275.000	-	-	-	-	-	-	-	74.275.000
283	Kota Ambon	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
284	Kab. Seram Bagian Barat	19.340.000	-	-	-	-	-	-	-	19.340.000
285	Kab. Seram Bagian Timur	23.185.975	-	-	-	-	-	4.935.000	-	28.120.975
286	Kab. Kupatani Baru	17.650.000	9.800.000	-	-	-	-	-	-	27.450.000
287	Kab. Tual	24.175.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
288	Kab. Bani Saitan	24.175.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
289	Kab. Halmahera Barat	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000
290	Kab. Halmahera Barat	18.300.000	4.850.000	-	-	-	-	-	1.000.000	24.150.000

NO	DAERAH	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	PELABUHAN DAERAH	PRASARANA PEMDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH
291	Kab. Mahakam Ulu	14.505.000	-	-	-	-	-	-	-	14.505.000
292	Kab. Tuluwau	5.802.000	-	-	-	-	-	-	-	5.802.000
293	Kab. Kutai	6.769.000	9.700.000	-	-	-	1.050.000	1.420.000	-	11.159.000
294	Kab. Berau	24.175.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
295	Kab. Kutai	-	-	-	-	-	24.375.000	-	-	24.375.000
296	Kab. Kutai	24.175.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
297	Kab. Kutai	24.175.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
298	Kab. Kutai	24.175.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
299	Kab. Kutai	-	-	-	-	24.062.500	-	-	-	24.062.500
300	Kab. Kutai	23.208.000	-	-	-	-	-	-	-	23.208.000
301	Kab. Kutai	24.175.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
302	Kab. Kutai	24.175.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
303	Kab. Kutai	14.505.000	-	-	-	4.812.500	-	-	-	19.317.500
304	Kab. Kutai	22.170.000	-	-	-	-	-	-	-	22.170.000
305	Kab. Kutai	-	-	14.775.000	-	-	-	9.570.000	-	24.345.000
306	Kab. Kutai	-	-	-	-	6.737.500	-	-	-	6.737.500
307	Kab. Kutai	18.022.500	7.275.000	-	-	-	-	-	-	25.297.500
308	Kab. Kutai	14.505.000	4.850.000	4.975.000	-	-	-	-	-	24.330.000
309	Kab. Kutai	-	-	-	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
310	Kab. Kutai	23.208.000	-	-	-	-	-	-	-	23.208.000
311	Kab. Kutai	8.500.000	-	-	-	-	-	-	-	8.500.000
312	Kab. Kutai	7.850.000	-	4.850.000	-	-	-	-	-	12.700.000
313	Kab. Kutai	23.208.000	-	-	-	-	-	-	-	23.208.000
314	Kab. Kutai	9.670.000	-	-	-	-	-	-	-	9.670.000
315	Kab. Kutai	-	-	-	-	17.325.000	-	-	-	17.325.000
316	Kab. Kutai	14.505.000	4.850.000	-	-	-	-	4.935.000	-	24.290.000
317	Kab. Kutai	24.500.000	-	-	-	-	-	-	-	24.500.000

NO	DAERAH	JALAN/ JENBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	PELABUHAN DAERAH	PRASARANA PEMDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH
318	Kab. Tegal	22.103,475	576.650,975	207.180,000	39.480,000	575.935,500	83.600,000	108.174,500	93.000,000	22.103,475
	TOTAL KABUPATEN	3.457.037,550								5.141.058,525

MENTERI KEUANGAN

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN 2
KEPADA
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
/2010/2010 TENTANG
PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH
PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH
ANGGARAN 2010

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota^{*)} Provinsi/Kabupaten/Kota (diisi nama daerah), menyatakan telah mencantumkan Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) Tahun Anggaran 2010 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 atau akan mencantulkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010 dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima transfer.

Terlampir disampaikan jadwal (*time schedule*) rencana penyelesaian atas kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Tahap I Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010.

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Gubernur/Bupati/Walikota

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ^{*)}.....

(Cap dan tanda tangan)

(materai Rp.6000,-)

Nama

^{*)} Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D. W. MARIOWARDOJO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA TENTANG
PEDOMAN LALU LAKSI ALIH KASIH DARI
PENGALIAN INDIKATOR DAN
PENGALIAN INDIKATOR TAHUN
ANGGARAN 2010

Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan
Provinsi/Kabupaten/Kota 01 (jika ada daerah)

No.	Kegiatan	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pembuatan Surat Penyaluran	21							
2	Pencapaian Tahap I								
3	Pelaksanaan Kegiatan Tahap I								
4	Pelaporan Penyelesaian Tahap I								
5	Pencapaian Tahap II								
6	Pelaksanaan Kegiatan Tahap II								
7	Pelaporan Penyelesaian Tahap II								
8	Pencapaian Tahap III								
9	Pelaksanaan Kegiatan Tahap III								
10	Pelaporan Final Kegiatan								

Keterangan:
1. Corel yang tidak perlu
2. Bar. Lulus (✓)

Tempat tanggal, bulan, tahun
Gubernur/Bupati/Walikota
Provinsi/Kabupaten/Kota 01

(Cap dan tanda tangan)
Materai Rp. (000,-)
Nama

MENTERI KEUANGAN

AGUS D. W. MARIOWARJOJO

LAMPIRAN IV
PEKATUKAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /2010/2010 TENTANG
PENOMORAN UMUM DAN ALOKASI DANA
PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN
PRASARANA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH (DPIPD) TAHUN ANGGARAN 2010

Provinsi/Kabupaten/Kota: 1)
Pecda APBD Nomor: Tanggal:

Bidang 2)	Pagu 3)
1.
2.
3. dst.
Total Pagu

Tanggal 2)	Tahap	Sisa Tahap Sebelumnya	Pemeriksaan dari Kas Umum Negara	Total	Ratifikasi pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SPPT Daerah) 4)	Sisa DPIPD di Rekening Kas Umum Daerah	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 2 + 4	6	7 = 5 - 6	8 = (7/5) x 100%
	Tahap I						
	Tahap II						
	Tahap III						
	Total						

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Gubernur / Bupati / Walikota:

(cap dan tanda tangan)
(maksud 600%,)

Nama:

Keterangan:

- 1) Coret yang tidak Perlu
- 2) Diisi Sesuai dengan Alokasi dalam Lampiran I
- 3) Diisi tanggal diterima di Rekening Kas Umum Daerah
- 4) Minimal 90% dari dana Alokasi DPIPD Tahun 2010 yang ada di Rekening Kas Umum Daerah

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO